# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU *KUSUKA* BAGI NELAYAN DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**Skripsi**

**Oleh:**

**ZAID HIZBULLAH**

**NPM: 1846041008**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

# ABSTRAK

## IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU *KUSUKA* BAGI NELAYAN DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**Oleh**

**Zaid Hizbullah**

Program kartu *kusuka* merupakan program kartu bagi nelayan yang digunakan sebagai identitas dan dapat digunakan untuk menerima bantuan, pembuatan kelompok usaha bersama dan sebagai syarat untuk melengkapi dokumen nelayan lainnya. Program ini dilandasi oleh PERMEN KP No.42 Tahun 2019 Tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program kartu *kusuka* dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah, dengan berdasarkan indikator teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu pengawasan yang melekat, keterpaduan hierarki lingkungan dan diantara lembaga-lembaga pelaksanaan, serta Sikap dan Sumberdaya yang dimiliki kelompok. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kartu *kusuka* bagi nelayan Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur masih belum optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan masih banyaknya nelayan yang masih belum mendaftarkan diri untuk membuat kartu *kusuka* dan belum adanya nelayan yang melakukan pencetakan kartu dalam bentuk blanko di Bank BNI yang saat ini bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat lebih aktif dalam melaksanakan sebuah program dan pemerintah juga perlu mempersiapkan solusi apabila target dari pelaksanaan program ini tidak mampu tercapai.

**Kata Kunci:** Implementasi dan Program Kartu *Kusuka*

## ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF KARTU *KUSUKA* PROGRAM FOR FISHERMEN IN MARGASARI VILLAGE, EAST LAMPUNG REGENCY**

**By**

**Zaid Hizbullah**

*The "Kartu Kusuka" program is a card program for fishermen that serves as identification and kartu kusuka can be utilized to receive assistance, establish joint business groups, and a requirement to complete other fishermen's documents. This program is based on the Permanent KP No. 42 of 2019 concerning marine and fisheries business cards. This research aims to analyse the implementation of the Kartu Kusuka program to protect and empower business actors, accelerate services, increase welfare, and create the effectiveness and efficiency of government programs, based on the indicators of Daniel Mazmanian and Paul Sabatier's theory of inherent supervision, hierarchy integration among the implementing institutions, and the attitude and resources of the group. The method used in this research is descriptive-qualitative, with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and observation. The outcome of this research indicates the implementation of the Kartu Kusuka program for fishermen in Margasari Village, East Lampung Regency, is still not optimal due to the many fishermen who have not yet registered to make a Kartu Kusuka and the lack of fishermen who have printed cards in the blank form at Bank BNI, which is currently collaborating with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Based on these results, the researcher recommends that the Ministry of Marine Affairs and Fisheries be more active in implementing programs. The government needs to prepare solutions if the target of this program's implementation cannot be achieved.*



***Keywords:*** *Implementation dan Kusuka Card Program*

# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU *KUSUKA* BAGI NELAYAN DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**Oleh**

**Zaid Hizbullah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**Sarjana Administrasi Negara**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU *KUSUKA* BAGI NELAYAN DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Zaid Hizbullah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1846041008**

Program Studi : **Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

| | |
|---|---|
| **Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji. M.Si** | **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si** |
| NIP. 196911032001121002 | NIP. 199109242019032019 |

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Meiliyana, S.IP., M.A**
NIP. 197405202001122002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji. M.Si**

Sekretaris : **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Meiliyana, S.IP., M.A**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Februari 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, *kecuali* arahan dari komisi pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, *kecuali* secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,

Zaid Hizbullah
NPM. 1846041008

## RIWAYAT HIDUP

Zaid Hizbullah, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 1999, sebagai anak ketiga dan buah kasih dari pasangan ayahanda Puguh Daru Kurniawan dan Ibunda Endah Setyorini. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Al-Hikmah pada tahun 2004, pada tahun 2005 melanjutkan TK di TKIT Tuhfa Sakinah, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDIT Iqro' Pondok Gede Bekasi dan selesai pada tahun 2011, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPIT Daarul Qur'an Tangerang Selatan yang selesai pada tahun 2014, dan menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial hingga selesai pada tahun 2018. Penulis diterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Mandiri.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis mengikuti organisasi kampus yaitu FSPI Fisip Unila dan HIMAGARA UNILA. Pada bulan Januari hingga Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Jatimakmur Kota Bekasi. Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022 penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di LSM Mitra Bentala Indonesia di Kemiling Kota Bandar Lampung.

Berkat rahmat dari Allah SWT, do'a serta dukungan oleh orang tua, saudara, dan semua teman-teman yang saya kenal, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2023

## MOTTO

***"Tidak Ada Waktu Untuk Melihat ke Belakang, Masa Depan Menantiku"***

**(Wan Wan)**

***"When you don't know what to do, just take the first step. The rest will figure itself out naturally"***

***(Beidou)***

**"Hidup itu tidak perlu dijalani secara terburu-buru, akan tetapi jalani lah hidup dengan perlahan tapi pasti. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing"**

**(Penulis)**

**PERSEMBAHAN**

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,
Aku persembahkan karya kecilku ini untuk:

**UMI DAN ABI KU TERCINTA**
**ENDAH SETYORINI DAN PUGUH DARU KURNIAWAN**

yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan dukungan
Terimakasih atas cinta, kerja keras dan kesabaran yang telah diberikan untuk keberhasilan dan kesuksesanku

para pendidik dan almamater Universitas Lampung yang selalu memberikan bekal ilmu serta moral untuk melangkah lebih jauh di masa depan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU *KUSUKA* BAGI NELAYAN DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" yang telah tersusun secara baik. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini belum tentu tersusun dengan baik seperti saat ini. pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Puguh Daru Kurniawan dan Ibu Endah Setyorini, terimakasih telah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anakmu. Terimakasih atas penguatan dan kasih sayang yang terus diberikan untukku disetiap harinya, serta untuk waktu, tenaga, biaya yang telah dikorbankan.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.PA selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
6. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Noverman Duadji. M.Si selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu dan saran, nasehat dan bimbingannya

8. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing pendamping penulis. Terimakasih atas ilmu, waktu dan saran, nasehat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Terlepas dari hal itu terimakasih atas segala kesempatannya telah diberikan banyak pengalaman dari ilmu yang ibu berikan
9. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik
10. Seluruh tim pendidik dan kependidikan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan
11. Kepada sahabat kosan SEKET LIMO, sang pemilik lahan Agung Payyy dan Lord Apin yang punya bandar lampung, King Dimas Investor terbesar dan Aldi yang punya bandara dan pesawat pribadi, terimakasih atas modal perkuliahan yang sudah kalian berikan, sukses terus buat kalian semua.
12. Kepada teman-teman kampusku Januar, Vita, Mita, Asri, Gandhi, Icad, Farhan, Anggara, Aji, Della, dan semua anak Andalusia yang tidak bisa disebutkan satu-satu terimakasih atas support sistem kalian, kenangan, pengalaman, hiburan, dan segalanya selama di dunia perkuliahan
13. Kepada Teman-teman paralel terimakasih telah memberikan warna selama perkuliahan baik suka dan duka meskipun hanya 16 orang satu kelas. Semangat dan sukses terus buat kalian semua.
14. Kepada Rani Dea Safitri terimakasih atas support sistem, penyemangat serta dukungan dalam membantu mengerjakan skripsi semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepadamu
15. Kepada teman-teman Magang MBKM atau PKL LSM Mitra Bentala Ridho, Rizki Setiawan, dan Else terimakasih telah mengisi warna kehidupan selama Magang atau PKL berlangsung
16. Terimakasih untuk mba dan abang HIMAGARA khususnya Bang Ega dan Mbak Vira serta mbak dan abang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu terimakasih atas bantuan selama perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi

17. Kepada para dekting Granada Ayyas, Ropiq, Ivan, Alip, Hendra, Risandi, Caca, Laila, Aya, Olip, Dinda, Veronika dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya dan semangat terus buat kalian dalam menyelesaikan perkuliahannya.
18. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung saya ucapkan terimakasih
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Bandar Lampung, 21 Februari 2023

Zaid Hizbullah

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **ii**

**ABSTRACT** ..... **iii**

**DAFTAR ISI** ..... **xiv**

**DAFTAR TABEL** ..... **xvii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xviii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **19**

1.1 Latar Belakang ..... 19

1.2 Rumusan Masalah ..... 24

1.3 Tujuan Penelitian ..... 24

1.4 Manfaat Penelitian ..... 24

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **25**

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik ..... 25

2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendekatannya ..... 27

2.3 Tinjauan Tentang Model Implementasi Kebijakan Publik ..... 28

2.4 Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) ..... 35

2.5 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu ..... 38

2.6 Kerangka Pikir ..... 40

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **42**

3.1 Tipe Penelitian ..... 42

3.2 Fokus Penelitian ..... 42
3.3 Lokasi Penelitian ..... 43
3.4 Teknik Pengumpulan Data ..... 43
3.4.1 Wawancara ..... 43
3.4.2 Dokumentasi ..... 45
3.4.3 Observasi ..... 46
3.5 Sumber Data ..... 47
3.5.1 Data Primer ..... 47
3.5.2 Data Sekunder ..... 47
3.6 Teknik Analisis Data ..... 47
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data ..... 48
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 50**
4.1 Gambaran Umum Desa Margasari ..... 50
4.1.1 Kondisi Biofisik dan Tata Guna Lahan ..... 50
4.1.2 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk ..... 51
4.2 Gambaran Umum Kementerian Kelautan dan Perikanan ..... 53
4.2.1 Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan ..... 53
4.2.2 Visi dan Misi ..... 54
4.2.3 Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan ..... 56
4.3 Gambaran Umum LSM Mitra Bentala ..... 58
4.3.1 Profil LSM Mitra Bentala ..... 58
4.3.2 Struktur Organisasi ..... 59
4.4 Hasil Penelitian ..... 59
4.4.1. Pengawasan Yang Melekat ..... 63

4.4.2. Keterpaduan Hierarki di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga Pelaksana ..... 70
4.4.3. Sikap dan Sumber Daya Yang Dimiliki Kelompok ..... 76
4.4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program ..... 84
4.5 Pembahasan Penelitian ..... 87
4.5.1 Pengawasan Yang Melekat ..... 87
4.5.2 Keterpaduan Hierarki di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-lembaga Pelaksana ..... 90
4.5.3 Sikap dan Sumber Daya Yang Dimiliki Kelompok ..... 92
4.5.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program ..... 93
**BAB V PENUTUP ..... 96**
5.1 Kesimpulan ..... 96
5.2 Saran ..... 99
**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**
**LAMPIRAN ..... 104**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu ..... 38
Tabel 2. Gambaran Data Informan Penelitian..... 44
Tabel 3. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian ..... 45
Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian ..... 46
Tabel 5. Pembagian luas Desa Margasari Menurut Tata Guna Lahannya ..... 51
Tabel 6. Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Margasari ..... 52
Tabel 7. Jumlah Guru dan Sarana Pendidikan di Desa Margasari ..... 52
Tabel 8.Persentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Margasari ..... 53
Tabel 9. Matriks Hasil Wawancara Indikator Pengawasan Yang Melekat ..... 69
Tabel 10. Matriks Hasil Wawancara Indikator Keterpaduan Hierarki di dalam Lingkungan dan Diantara Lembaga-Lembaga Pelaksana ..... 75
Tabel 11. Struktur KUB Desa Margasari ..... 81
Tabel 12. Matriks Wawancara Indikator Sikap dan Sumber Daya Yang Dimiliki Kelompok ..... 82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh kartu Kusuka..... 35
Gambar 2. Kerangka Pikir..... 41
Gambar 3. Website Kartu Kusuka ..... 61
Gambar 4. Hierarki Implementor Program kartu kusuka..... 72

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dirancang dengan baik, tetapi tidak diterapkan dengan baik dan tidak mempengaruhi kehidupan negara. Istilah implementasi berarti menyediakan sarana pelaksanaan sesuatu yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pegawai negeri, atau pemerintah atau sekelompok individu, dengan tujuan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu (Rahman, 2011).

Cara pandang dalam proses pelaksanaan program pemerintah tentu mengatur perilaku satu atau lebih kelompok sasaran, termasuk perilaku birokrat dalam memberikan pelayanan dan pelayanan tertentu kepada masyarakat. Oleh karena itu, analisis implementasi program adalah upaya pengambilan keputusan maupun upaya memberikan pelayanan, atau mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran program yang bersangkutan, terutama pada saat pelaksanaan program yang melibatkan instansi atau organisasi pemerintah.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, sangat antusias mencapai pelayanan terbaik dan ingin mekanismenya berjalan lebih mudah. Sebagaimana yang masyarakat ketahui, praktik pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menggunakan kartu sebagai alat atau sarana resmi yang diberikan atau ditargetkan untuk pemberian layanan, dengan kata lain ada identitas yang dimiliki masyarakat berupa kartu agar efektif dalam memberikan pelayanan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

menjalankan misi presiden tersebut adalah program pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Daniarsyah, 2020).

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan peraturan menteri berupa kartu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan bagi para nelayan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikeluarkannya peraturan menteri kartu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan oleh KKP ini dikarenakan untuk mempermudah KKP dalam menentukan program agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dilakukan secara optimal. Salah satu upaya KKP yang dilakukan adalah pembuatan kartu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan (*kusuka*) (Himawan et al., 2021).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 42 Tahun 2019 tentang Kartu Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan pada bagian ruang lingkup pasal 2 menyatakan bahwa pelaku utama sektor kelautan dan perikanan meliputi (1) Nelayan, (2) Pembudi daya ikan, (3) Petambak garam, (4) Pengolah ikan, dan (5) Pemasar ikan. Sasaran atau kelompok sasaran dari kartu *kusuka* merupakan sekelompok nelayan atau masyarakat individu yang dapat mendaftarkan diri untuk pembuatan kartu *kusuka* sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan. Program yang dikeluarkan oleh Kementerian berupa kartu *kusuka* kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan sudah dilaksanakan di seluruh daerah pesisir di Indonesia, salah satunya di Provinsi Lampung.

Pengimplementasian kartu *kusuka* di Provinsi Lampung sudah berjalan dari tahun 2017-2021, rekapan data kartu *kusuka* di pulau Sumatera (cetak) pada tahun 2022 berjumlah 36.531 kartu dari 540.283 nelayan. Dan untuk di Provinsi Lampung kartu *kusuka* yang sudah di cetak berjumlah 2.390 kartu dari 31.174 nelayan dengan nelayan terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah 16.159 nelayan dengan salah satu desanya adalah Desa Margasari (Satu Data KKP, n.d.).

Desa Margasari merupakan salah satu desa di Kabupaten Lampung Timur yang mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Margasari adalah sebagai nelayan rajungan yang masyarakatnya bergabung dalam Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara (FORKOM NELANGSA) cabang Lampung yang diresmikan pada tanggal 10 Desember 2021. Forkom Nelangsa tersebut bertujuan sebagai wadah untuk memperkuat kelompok-kelompok nelayan rajungan di Desa Margasari, sehingga Forkom Nelangsa ini dapat berfungsi dengan baik yang nantinya dapat berperan aktif dalam pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, termasuk mewakili golongan dalam Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB).

Pada Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2019 ini, pelaksanaan nya melibatkan beberapa pelaksana yang terlibat secara langsung yaitu, Penyuluh Pendamping Lapangan dari KKP, Bank BNI, Aparatur Desa Margasari, dan Nelayan atau Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Untuk yang terlibat secara tidak langsung selama pelaksanaan di Desa Margasari yaitu LSM Mitra Bentala. Pelaksanaan program kartu *kusuka* di Desa Margasari dimulai dari tahun 2017-2021 untuk memberikan bantuan dan memutus rantai hutang-piutang yang dilakukan nelayan untuk menjalankan profesinya sebagai nelayan. Namun pada faktanya program kartu kartu *kusuka* masih belum mampu memberikan bantuan kepada seluruh nelayan dan memutus rantai hutang-piutang tersebut. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaan implementasi program kartu *kusuka* dilaksanakan.

Kartu *kusuka* dibuat agar pelaku usaha semakin mudah mendapatkan modal usaha dari perbankan. Menurut Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, daripada nelayan utang ke rentenir yang bunganya bisa mencapai 200 persen, dengan kartu *kusuka* mereka bisa mendapat pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Selain berisi data diri pelaku usaha sebagaimana termuat di dalam Kartu Tanda Penduduk, kartu *kusuka* juga berisi jenis usaha yang dilakukan pemilik kartu hingga seberapa besar skala usaha yang mereka jalankan. Bahkan dengan memindai *QR code* di

bagian depan kartu, bisa diketahui *cashflow* pemegang kartu. Hal ini mempermudah pelaku usaha mendapatkan kredit dari perbankan karena profilnya sudah terbaca jelas dalam satu kartu. Dampaknya adalah masyarakat umum, khususnya pelaku usaha perikanan, semakin akrab dengan dunia perbankan, dan semua transaksi yang terjadi tidak hanya tersentralisasi di kota tetapi juga di pinggiran pantai (Ken, 2020).

Selama pelaksanaan program kartu kusuka PPL sangat mendahulukan bagi nelayan yang sudah mulai membentuk kelompok, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kesempatan bagi nelayan yang ingin membuat kartu secara individu. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh nelayan sebagai tanda identitas yaitu kartu *kusuka*. Dalam Pembuatan kartu *kusuka* di Desa Margasari agar tepat sasaran, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala ikut berpartisipasi di dalamnya melalui *Community Organizer* (CO). Menurut (Ronasifah et al., 2019) dalam Affan Gaffar, 2006) LSM adalah lembaga non-pemerintah yang memiliki peranan sebagai jembatan masyarakat dengan pemerintah. LSM memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial.

Pelaksanaan kartu *kusuka* di Desa Margasari didasari oleh adanya tiga hal, sebagai berikut: (a) Banyaknya jumlah nelayan kecil, (b) Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, (c) Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, pengimplementasian kartu *kusuka* yang telah dilakukan di Desa Margasari selama periode 2017-2021 belum berjalan dengan optimal karena ada beberapa permasalahan yang terjadi selama pengimplementasiannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Afrizal selaku CO pendamping dari LSM Mitra Bentala di Desa Margasari lewat wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa pembuatan kartu *kusuka* hanya bisa didaftarkan oleh Penyuluh Pendamping Lapangan (PPL) yang memegang 2 kecamatan sekaligus, sehingga pembuatan kartu *kusuka* mengalami hambatan dalam

pengimplementasiannya. Hal ini juga yang menyebabkan ditemukannya masyarakat yang belum memiliki kartu *kusuka*.

Pernyataan di atas diperjelas dengan data jumlah nelayan yang sudah memiliki kartu *kusuka* di Desa Margasari dengan jumlah 42 nelayan dari 156 nelayan, jika dipersentasikan pengimplementasian kartu *kusuka* di Desa Margasari baru terlaksana 30%. Salah satu faktor penghambat implementasi program adalah ditemukannya beberapa masyarakat yang gagal mendaftar kartu *kusuka* karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) nelayan tersebut tidak terdaftar di disdukcapil, sehingga pendaftarannya tidak bisa dilanjutkan.

Uraian di atas merupakan argumentasi pentingnya penelitian ini dilakukan, tentang betapa pentingnya kelengkapan dokumen nelayan terutama memiliki kartu identitas sebagai nelayan. Jika implementasi kartu *kusuka* tidak berjalan secara optimal, maka masyarakat yang harusnya mendapat perhatian dan bantuan tidak bisa tersampaikan karena mereka tidak terdata yang mengakibatkan para nelayan kecil terus-menerus terlibat dalam pinjaman kepada rentainir yang bunga pinjamannya bisa mencapai hingga 200 persen. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur serta melibatkan LSM Mitra Bentala dalam membantu membentuk kelompok nelayan dan mensosialisasikan program kartu *kusuka* di lingkungan masyarakat, Guna memudahkan pemerintah pusat dalam memberikan akses bantuan kepada nelayan di pesisir timur Lampung.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian tentang **"IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU *KUSUKA* BAGI NELAYAN DI DESA MARGASARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai?

## 1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat analisa secara mendalam mengenai pelaksanaan implementasi program kartu *kusuka*.

b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengimplementasian program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi khususnya bagi penulis serta segala pihak pada umumnya yang tentunya berkaitan dengan pengimplementasian program Kartu Kusuka.

b. Manfaat Aplikatif

   Hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur dan pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah disiplin ilmu independen yang mempelajari hal-hal berikut: (a) menentukan arah umum yang harus diambil untuk mengelola masalah sosial, (b) menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan (c) memahami ruang lingkup dan ukuran organisasi. Kompetensi analisis kebijakan publik sangat bergantung pada objektivitas dan kualitas informasi, serta kepekaan analis untuk mengangkat isu publik secara profesional dengan berfokus pada semua pihak terkait (*stakeholder*) (Arnawa, 2020).

Menurut Anderson dalam (Agustino, 2016) kebijakan publik adalah sebagai *"A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern".* Sederhananya, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu yang diupayakan dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pelaku yang berkaitan dengan masalah atau isu yang diperhatikan. Menurut Thoha (dalam Ramdhani, 2016) kebijakan publik memiliki dua aspek, yaitu:

a. Kebijakan adalah praktik sosial, kebijakan bukanlah peristiwa tunggal atau terisolasi. Oleh karena itu, kebijakan adalah sesuatu yang diproduksi oleh pemerintah dan dirumuskan atas dasar segala peristiwa dalam masyarakat. Kejadian ini tumbuh dalam praktik kehidupan sosial dan tidak berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
b. Kebijakan adalah reaksi terhadap peristiwa yang terjadi baik untuk menciptakan keselarasan antara pihak-pihak yang berkonflik maupun untuk

menciptakan insentif bagi tindakan bersama oleh para pihak yang diperlakukan secara tidak rasional oleh usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan upaya menyelesaikan masalah dengan institusi dan tahapan tertentu. Pedoman umumnya bersifat fundamental, karena kebijakan hanya memberikan pedoman umum sebagai dasar tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses analisis kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling memiliki hubungan dan diatur berdasarkan urutan waktu yang meliputi agenda (*Agenda Setting*), formulasi kebijakan (*Policy Formulation*), implementasi kebijakan (*Policy Implementation*), dan penilaian kebijakan (*Policy Review*) (Aneta, 2012).

Analisis kebijakan merupakan awal, bukan akhir dari upaya perbaikan proses pembuatan kebijakan. Sebelum informasi terkait kebijakan dapat digunakan oleh pengguna yang ditargetkan, informasi tersebut harus diatur ke dalam dokumen terkait kebijakan dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk presentasi. Seluruh proses komunikasi kebijakan memiliki tahapan yaitu; (a) Analisis kebijakan, (b) Pengembangan konten, (c) Komunikasi interaktif, dan (d) Pemanfaatan pengetahuan (Suharno, n.d.).

Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komunitas politik yang memiliki kepentingan publik. Namun, kebijakan publik dapat ditingkatkan jika ada dinamika yang berimplikasi pada kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik bersifat fleksibel dan dapat ditingkatkan serta disesuaikan dengan perkembangan. Proses perbaikan dan penyesuaian dipengaruhi oleh penilaian dari masyarakat. Jika tidak ada proses implementasi kebijakan publik, kebijakan publik tidak akan dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan untuk merumuskan

dan melaksanakan kebijakan. Proses implementasi kebijakan publik didasarkan pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan (Desrinelti et al., 2021).

## 2.2 Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendekatannya

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus pemerintah dalam merancang implementasi kebijakan (Tresiana & Duadji, 2019). Menurut Santosa implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melakukan kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan (Surjana, 2018).

Fase implementasi kebijakan merupakan fase yang krusial, karena fase ini akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tahap implementasi harus dipersiapkan dengan baik pada perumusan kebijakan. Implementasi secara konseptual dapat digambarkan sebagai proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia, dan biaya) diikuti dengan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang dilakukan merupakan cara untuk mentransformasikan rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi model operasional (Cristianingsih, 2020).

Implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, tetapi juga partisipasi masyarakat dan kekuatan politik, ekonomi dan sosial dari berbagai partai politik. Menerapkan kebijakan secara tepat sasaran dan efisien dapat memecahkan masalah dengan baik. Semakin kompleks masalah kebijakan dan semakin dalam analisis yang digunakan, semakin banyak juga teori dan modal yang dibutuhkan untuk menjelaskan keakuratan implementasi kebijakan. Analisis kebijakan perlu dilakukan, terutama terhadap dampak yang dihasilkan. Penelitian implementasi

kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat (Mansur, 2021).

Ripley dan Franklin dalam (Besar, 2010) memperkenalkan pendekatan "kepatuhan" dan pendekatan "faktual" untuk implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik dengan fokus pada upaya untuk menetapkan kepatuhan agen atau bawahan agen atau atasan dalam suatu organisasi. Perspektif kepatuhan adalah analisis dari karakter dan kualitas perilaku perusahaan. Menurut keduanya, setidaknya ada dua kekurangan dalam perspektif kepatuhan, yaitu sebagai berikut:

a. Banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan,
b. Adanya program yang tidak di desain dengan baik

Sementara perspektif faktual mengasumsikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, para pelaksana harus lebih fleksibel dalam melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, pelaksanaan kepatuhan terhadap pengawas harus dibuktikan sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan pedoman atau program.

## 2.3 Tinjauan Tentang Model Implementasi Kebijakan Publik

Lahirnya generasi demi generasi para ahli dalam ilmu administrasi atau ilmu kebijakan memunculkan konsentrasi pemikiran mengenai implementasi yang diprakarsai oleh mereka. Model-model tersebut antara lain sebagai berikut: (Dewi, 2016)

A. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, dengan model *Top-Down Approach*

   Menurut mereka, implementasi kebijakan akan berjalan sempurna jika mempunyai persyaratan sebagai berikut:

   a. Kondisi eksternal yang tidak menimbulkan gangguan atau hambatan

b. Tersedianya sumber-sumber yang memadai dan waktu yang cukup
c. Perpaduan sumber-sumber yang tersedia
d. Hubungan kapasitas antara rencana dan pelaksanaannya
e. Hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung dan hanya sedikit *linkage*-nya
f. Hubungan dependensi yang longgar
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan tentang tujuan
h. Tugas-tugas yang diperinci dan diurutkan dengan tepat
i. Komunikasi yang sempurna
j. Pihak berwenang yang dapat mengklaim dan mendapatkan kepatuhan (*compliance*) yang sempurna.

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas memilih syarat yang bersifat politis, strategis, dan teknis.

B. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Dalam (Agustino, 2016) menjelaskan Model Van Meter dan Van Horn merupakan model klasik atau model pertama (1975). Menurut model ini, implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan publik sangat realistis terhadap *sosio-kultur* yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan kebijakan terlalu idealis atau bahkan terlalu bersifat *utopis* untuk dilakukan di tingkat warga, maka akan sulit melaksanakan kebijakan publik hingga bisa dikatakan berhasil.

b. Sumber daya

Kesuksesan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Akan tetapi, selain SDM terdapat sumber-sumber daya lain yang perlu dipertimbangkan yaitu sumber daya *financial* dan waktu. Kedua hal ini perlu dipertimbangkan karena ketika SDM yang tersedia sudah kompeten tetapi anggaran dana tidak ada, maka akan menimbulkan hambatan dan masalah dalam merealisasikan tujuan kebijakan.

c. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor

Pusat perhatian pada implementor meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Karena hasil kinerja implementasi akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dan cocok dengan para agen implementornya.

d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementor

Sikap lembaga pelaksana untuk menerima atau menolak akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini kemungkinan terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukan merupakan hasil dari warga lokal yang sadar betul akan permasalahan dan permasalahan yang mereka rasakan. Namun kebijakan yang akan diterapkan oleh pelaksana adalah kebijakan top-down yang membuat pembuat kebijakan mungkin tidak pernah tahu kebutuhan, keinginan, atau masalah apa yang ingin ditangani warga.

e. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan, dan juga merupakan syarat utama. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, asumsi kesalahan yang akan terjadi sangat kecil dan begitu sebaliknya.

f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan yang dimaksud dalam poin ini adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi akar permasalahan dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Maka dari itu, segala upaya yang dilakukan selama proses implementasi kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

C. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier disebut juga sebagai model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Menurut model ini, implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mereka mengkategorisasi proses implementasi pada tiga kategori besar yaitu sebagai berikut:

a. Mudah atau sulitnya masalah dikendalikan (*Variabel Independen*), yaitu:

a.) Berfungsinya: (a) Pengawasan yang melekat, (b) Pengawasan Masyarakat, (c) Pengawasan Fungsional, (d) Pengawasan Umum, (e) Pengawasan Represi, (f) Pengawasan Preventif

b.) Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya suatu kebijakan akan tergantung dalam sejumlah persyaratan teknis yg meliputi: kemampuan

untuk meningkatkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang hemat biaya dan pemahaman tentang prinsip-prinsip interaksi kasual yang berdampak pada masalah. selain itu taraf keberhasilan suatu kebijakan ditentukan juga oleh adanya pengembangan terhadap teknik-teknik tertentu

c.) Keberagaman perilaku yang akan diatur

Semakin banyak perbedaan perilaku yang diatur, maka artinya semakin banyak pelayanan yang ditawarkan sehingga semakin sukar dalam pengambilan keputusan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu akan semakin besar kebebasan bertindak yang perlu dikendalikan oleh para implementor di lapangan.

d.) Persentase jumlah penduduk dalam kelompok sasaran

Semakin jelas kelompok sasaran yang akan dibentuk melalui implementasi kebijakan, maka tingkat keberhasilan suatu kebijakan akan semakin besar peluangnya.

b. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi (*Variabel Intervening*):

a.) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan resmi akan dicapai

Semakin jelasnya sebuah aturan dibentuk dalam memberikan petunjuk berdasarkan skala prioritas, maka peluang *output* kebijakan akan sejalan dengan dengan petunjuk tersebut akan semakin besar.

b.) Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan

Berisi tentang tentang teori yang menjelaskan bagaimana usaha pembaruan yang akan diperoleh melalui implementasi kebijakan.

c.) Ketepatan alokasi sumber-sumber dana

Ketersediaan dana sangatlah diperlukan, agar kesempatan tercapainya tujuan-tujuan dari kebijakan semakin besar

d.) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga pelaksana

Salah satu hal yang perlu dimiliki dari setiap peraturan perundang-undangan yang baik adalah mampu untuk menyatukan tingkatan-tingkatan badan-badan pelaksana kebijakan. Apabila dalam menyatukan dinas, badan, dan lembaga saja tidak dilaksanakan dengan baik, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan untuk mempermudah implementasi kebijakan malah akan sebaliknya.

e.) Aturan pembuatan keputusan dari badan pelaksana

Selain memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, mengurangi hak *veto*, insentif yang memadai bagi kelompok sasaran untuk mematuhinya, undang-undang harus dapat lebih mempengaruhi proses implementasi kebijakan secara formal menguraikan aturan pengambilan keputusan dari badan eksekutif.

f.) Kesepakatan para pejabat atas tujuan yang termasuk dalam undang-undang atau peraturan

Pejabat eksekutif memiliki protokol yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini sangat penting karena *Top-down policy* bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan oleh pejabat eksekutif daerah.

g.) Akses-akses formal pihak luar

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang partisipasi oleh aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Hal ini berarti bahwa kontrol atas pejabat eksekutif yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan di luar Undang-Undang (*Variabel Dependen*) meliputi:

a.) Dukungan Publik

Untuk meningkatkan angka keberhasilan suatu kebijakan, maka sangat dibutuhkannya dukungan oleh masyarakat. Karena hakikat perhatian publik adalah bersifat menimbulkan kesulitan atau kemudahan tertentu.

b.) Kondisi Sosial-Ekonomi Dan Teknologi

Adanya perbedaan waktu dan perbedaan daerah-daerah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, dan ekonomi, teknologi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tercapainya tujuan yang tertera di dalam suatu Undang-Undang.

c.) Sikap Dan Sumberdaya Yang Dimiliki Kelompok

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan akan sangat mudah dilakukan apabila di tingkat masyarakat, warga mempunyai sumber-sumber dan perilaku yang baik terhadap kebijakan yang ditawarkan kepada mereka.

d.) Kesepakatan Dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana

Persetujuan pejabat lembaga merupakan fungsi dari kemampuan hukum untuk melembagakan dampaknya terhadap lembaga eksekutif dengan memilih lembaga dan pejabat seniornya. Selain itu, komunikasi antar lembaga atau individu dalam lembaga sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Dari penjelasan diatas terkait model-model implementasi kebijakan, penulis memilih model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sebagai fokus penelitian dikarenakan model ini sesuai dengan fokus dari penelitian ini "Implementasi Program Kartu Kusuka Bagi Nelayan di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur".

## 2.4 Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (*Kusuka*)

Gambar 1. Contoh kartu Kusuka

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (*KUSUKA*) adalah kartu identitas nelayan yang dapat membuktikan bahwa anda adalah seorang nelayan. Kartu *kusuka* menjadi syarat utama bagi nelayan untuk mengakses program-program yang dikeluarkan pemerintah untuk nelayan. Program ini dilakukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan

kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah (Himawan et al., 2021).

Kartu *kusuka* ini merupakan salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memutus rantai kegiatan pinjaman uang kepada rentenir yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil. Karena pinjaman yang diberikan oleh rentenir kepada nelayan kecil memiliki bunga pinjaman yang tinggi, sehingga hal ini sangat membebankan para nelayan dalam melakukan usahanya (Ken, 2020).

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2019 merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan kartu *kusuka* baik di Pusat maupun di daerah.

Adapun kartu *kusuka* memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan
b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan
c. Pelayanan dan pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
d. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kementerian kelautan dan perikanan

Mengutip dari (Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, n.d.) Pengusaha yang berhak menerima kartu *kusuka* adalah nelayan, petani air tawar, payau atau air laut, dan petani garam. Semua kegiatan yang berkaitan dengan *pra*-produksi, produksi, *pasca*-produksi, pengolahan, pemasaran dan budidaya garam juga tercakup. Ruang lingkup pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berhak mendapatkan kartu *kusuka* ialah:

a. Nelayan terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik

b. Pembudi daya ikan terdiri atas pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan
c. Petambak garam terdiri atas petambak garam kecil, penggarap petambak garam, dan pemilik tambak garam
d. Pengolah ikan
e. Pemasar perikanan
f. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan

Adapun manfaat yang didapatkan bagi pelaku usaha perikanan dari kartu *kusuka* ini adalah:

a. Memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi online
b. Memudahkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
c. Memudahkan dalam pengajuan asuransi nelayan

Untuk biaya pembuatan kartu *kusuka* dijelaskan dalam PERMEN KP No. 42 Tahun 2019 pasal 29 bahwa setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan penerbitan dengan pencetakan kartu *kusuka* dilakukan oleh pihak perbankan tidak dikenakan biaya atau gratis. Namun jika pelaku usaha melakukan perpanjangan atau pergantian kartu dengan pencetakan kartu *kusuka* dilakukan oleh pihak perbankan, maka akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi jika pelaku usaha melakukan perpanjangan, penerbitan, perubahan, ataupun penggantian kartu *kusuka* dengan pencetakan kartu *kusuka* dilakukan oleh Direktorat Jenderal tidak akan dikenakan biaya atau gratis.

## 2.5 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| Nama Penulis | Judul Jurnal | Hasil Penelitian | Relevansi / Persamaan |
|---|---|---|---|
| (Eriyanti & Yanto, 2019) | Efektifitas Pemanfaatan Kartu Nelayan Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang | Ketepatan sasaran merupakan acuan dalam sebuah program. Apabila program tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan tetap berjalan. Dalam kaitan dengan ketepatan sasaran program penerima kartu nelayan di kecamatan koto tengah, jumlah kartu nelayan telah diterima data yang masuk dalam pendataan asuransi pada tahun 2016 yaitu 216 jiwa, dan di tahun 2017 meningkat 347 jiwa menjadi 563 jiwa. | Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas program kartu nelayan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. |
| (Pioh et al., 2020) | Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Sindulang I Kecamatan Tuminting) | Adanya kartu ini merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan, penerbitan kartu nelayan ini menjadi instrument bagi Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan lembaga pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. | Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas akses-akses kemudahan yang di dapat dari adanya pembuatan kartu nelayan. |

| Nama Penulis | Judul Jurnal | Hasil Penelitian | Relevansi / Persamaan |
|---|---|---|---|
| (Ichtiar et al., 2021) | Implementation of Marine and Fisheries Business Actor Card Policy (*KUSUKA*) in West Aceh Region | implementasi kebijakan kartu *kusuka* di wilayah Aceh Barat masih belum baik. Hal ini dikarenakan semua indikator keberhasilan implementasi kebijakan belum terpenuhi. Masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan, seperti kurangnya fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh penyuluh perikanan khususnya sarana transportasi dan permasalahan pada aspek komunikasi seperti pemahaman masyarakat. Dalam hal ini penyuluh perikanan harus berusaha lebih keras karena masih banyak masyarakat di Aceh Barat, terutama nelayan yang tidak berpendidikan tinggi, sehingga agak sulit bagi mereka untuk memahami isu kebijakan yang sering berubah. | Perbedaan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat. Di Aceh Barat komunikasi belum berjalan dengan baik sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui atau memiliki kartu *kusuka*. Sedangkan penelitian yang saya lakukan di Desa Margasari, komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat berjalan dengan baik, tetapi masih ada masyarakat yang belum memiliki kartu *kusuka*. |

## 2.6 Kerangka Pikir

Pelaksanaan kartu *kusuka* yang diterapkan di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi sebuah program kartu *kusuka* dengan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Sabatier dengan menggunakan tiga indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu (1) Pengawasan yang melekat, (2) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga pelaksanaan, (3) Sikap dan Sumberdaya yang dimiliki kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan berikut ini:

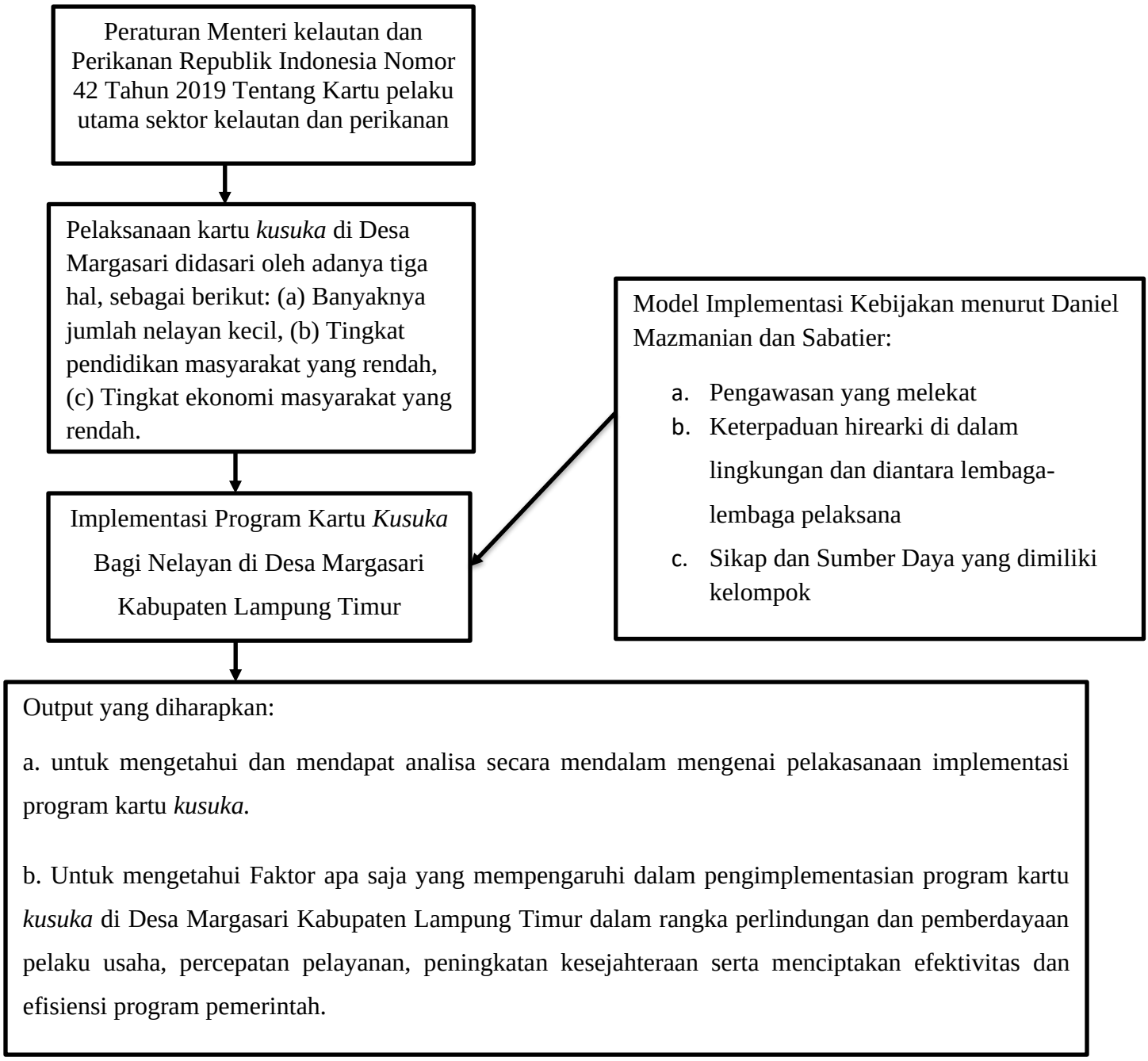


*Gambar 2. Kerangka Pikir*

*Sumber: (Diolah Peneliti Tahun 2022)*

# BAB III METODE PENELITIAN

## 3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan deskriptif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan, mengungkapkan, menceritakan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada. Jenis penelitian ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam pengimplementasian program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur.

## 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data. sehingga, dengan adanya fokus penelitian maka peneliti akan fokus dalam memahami masalah-masalah dan mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang akan diteliti dari pengimplementasian program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kab. Lampung Timur yaitu; (1) Pengawasan yang melekat, (2) Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga pelaksanaan, (3) Sikap dan Sumberdaya yang dimiliki kelompok.

## 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tempat meneliti implementasi program kartu *kusuka* adalah Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena Desa Margasari merupakan salah satu desa dengan jumlah nelayan tangkap yang menggunakan kapal dibawah 5 GT (*Gross Ton*) lebih banyak dibandingkan desa lainnya seperti Desa Muara Gading Mas.

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data

### 3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Menurut (Sugiyono, 2014) wawancara dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung, yaitu antara penulis dan informan. Adapun informan yang dibutuhkan oleh penulis untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

a.) Kementerian kelautan dan perikanan melalui PPL
b.) Ketua KUB
*c.)* *Community Organizer* (CO) LSM Mitra Bentala
*d.)* Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
e.) Masyarakat Desa Margasari yang sudah memiliki kartu *kusuka*
f.) Masyarakat Desa Margasari yang belum memiliki kartu *kusuka*

Wawancara dilakukan oleh peneliti di Desa Margasari, Kab. Lampung Timur, LSM Mitra Bentala selama bulan Juli – Agustus 2022. Wawancara yang dilakukan secara mendalam dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan utama. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan penyusunan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada informan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam melaksanakan wawancara, peneliti dibantu menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, alat rekam (*voice*

*recorder*), catatan, laptop untuk memperoleh data. Berikut gambaran data informan dan informasi yang dicari oleh peneliti dalam implementasi program kartu *kusuka.*

**Tabel 2. Gambaran Data Informan Penelitian**

| No. | Informan | Informasi Yang Dicari |
|---|---|---|
| 1. | Bapak Romli selaku PPL dari Kementerian | a. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi program kartu *kusuka*<br>b. untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung selama implementasi program kartu *kusuka*<br>c. untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung |
| 2. | Bapak Miswan selaku Ketua KUB | a. untuk mengetahui bagaimana sikap dan sumber daya kelompok terhadap program kartu *kusuka*<br>b. untuk mengetahui apa saja manfaat yang sudah dirasakan sebagai target sasaran program |
| 3. | Bapak Syamsurizal selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur | a. untuk mengetahui peran dinas dalam implementasi program kartu *kusuka*<br>b. untuk mengetahui bagaimana implementasi program kartu *kusuka* dilakukan |

| No. | Informan | Informasi Yang Dicari |
|---|---|---|
| 4. | Mas Afrizal selaku *Community Organizer* dari LSM Mitra Bentala | untuk mengetahui peran LSM Mitra Bentala dalam pengimplementasian program kartu *kusuka* |
| 5. | Kepala Cabang Bank BNI Kota Metro | Untuk mengetahui terkait pendistribusian kartu *kusuka.* |
| 6. | Nelayan yang sudah memiliki kartu *kusuka* | untuk mengetahui bagaimana sikap dan manfaat yang dirasakan selama memiliki kartu *kusuka.* |
| 7. | Nelayan yang belum memiliki kartu *kusuka* | Untuk mengetahui kendala yang dirasakan dalam pembuatan kartu *kusuka* |

*(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)*

### 3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti tertulis, metode dokumentasi berarti mengumpulkan informasi dari catatan-catatan atau peninggalan arsip-arsip penting, buku-buku tentang pendapat, teori dan opini serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

**Tabel 3. Gambaran Data Dokumentasi Penelitian**

| No. | Nama Dokumen | Informasi Yang Dicari |
|---|---|---|
| 1. | Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2019 | a. Sistematika pelaksanaan program kartu *kusuka dan* ruang lingkup penerimaan pembuatan kartu *kusuka* |
| 2. | Data kelompok nelayan di Desa Margasari | Berapa jumlah kelompok yang sudah dibentuk selama implementasi program kartu *kusuka* dilaksanakan |

*(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)*

### 3.4.3 Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lain yaitu wawancara dan survei. Jika wawancara dan survei selalu berkomunikasi dengan orang secara langsung, observasi dilakukan melalui pengamatan tidak terbatas pada orang. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi adalah proses yang kompleks, proses yang terdiri dari beberapa proses secara biologis dan psikologis (Sugiyono, 2014).

Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data untuk observasi dalam kaitannya dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan saat pengamatan tidak terlalu besar. Observasi dapat dilakukan mengenai proses pelaksanaan pengumpulan data. Berikut merupakan gambaran objek observasi yang akan diamati oleh peneliti dalam penelitian implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari.

**Tabel 4. Gambaran Objek Observasi Penelitian**

| No. | Objek Yang Diamati | Informasi Yang Dicari |
|---|---|---|
| **1.** | Pengawasan yang melekat | Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan terhadap PPL yang ditugaskan di lapangan |
| **2.** | Keterpaduan hierarki lingkungan dan diantara lembaga-lembaga pelaksanaan | Sistematika komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi program kartu *kusuka*. |
| **3.** | Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok | Bagaimana sikap dari target sasaran terhadap program yang ditawarkan yaitu program kartu *kusuka* |

*(Sumber: Diolah Peneliti, Tahun 2022)*

## 3.5 Sumber Data

### 3.5.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*) tentang implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.

### 3.5.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti yang bersumber dari data yang sudah diolah dalam bentuk dokumen, atau informasi tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian tentang Implementasi Program kartu *kusuka* di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Menurut (Moleong, 2019) Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit. Analisis data juga merupakan penjelasan dasar untuk menemukan topik dan memungkinkan peneliti dalam merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) Pengolahan data kualitatif bersifat interaktif dan berulang-ulang sampai data lengkap dan jenuh. Ketika menganalisis data, peneliti akan membaca atau mempelajari data dan memberikan kode atau kata kunci pada data, lalu mengurutkan dan mengklasifikasikan data, sehingga menemukan hubungan antara data dan fenomena untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Analisis data dilakukan melalui tiga Langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

   Reduksi Data adalah ulasan dari semua aktivitas yang direkam yang diperoleh oleh teknik observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Reduksi

data merupakan kegiatan abstrak atau rangkuman data dalam laporan evaluasi sistem dan fokus pada hal-hal penting.

b. Display Data

Display Data adalah untuk meringkas poin utama, dan kemudian mengaturnya menjadi deskripsi naratif dan sistematis, agar lebih mudah ditemukan dalam menentukan tema sentral berdasarkan fokus atau ekspresi unsur-unsur yang dievaluasi, dan memfasilitasi penelitian untuk melihat deskripsi elemen yang dievaluasi keseluruhan. Display data menampilkan data yang disajikan dalam beberapa tampilan matriks, grafik, bagan, diagram alur, gambar, dan lain sebagainya.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk mencari makna dari data yang terkumpul lebih teliti. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari pola, tema, bentuk, hubungan, persamaan dan perbedaan, faktor yang mempengaruhi. Hasil dari kegiatan ini adalah kesimpulan secara keseluruhan, lengkap dari hasil penelitian.

## 3.7 Teknik Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan metode baru dalam konsep validitas dan reliabilitas (Moleong, 2019). Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang muncul pada objek penelitian dengan data yang dapat digunakan untuk laporan peneliti. Sedangkan reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2014).

Salah satu metodologis dalam penelitian kualitatif adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teori, metode dari penjelasan penelitian kualitatif. Triangulasi juga diartikan sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dapat diartikan peneliti melakukan perbandingan dengan cara mengecek ulang informasi yang sudah di dapat melalui sumber yang berbeda. Contohnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada atau membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara, kemudian peneliti melakukan pengecekan data dengan kuisioner atau dokumentasi. Jika ditemukan perbedaan setelah dilakukan pengecekan tersebut.

c. Triangulasi Waktu

Salah satu yang mempengaruhi keakuratan data adalah waktu. Data yang diperoleh ketika wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih merasa segar dan belum menghadapi masalah akan memberikan data yang lebih akurat. Maka dari itu, dalam rangka melakukan pengecekan data peneliti melakukan wawancara, observasi ataupun teknik lainnya dalam situasi dan waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan salah satu dari ketiga macam triangulasi yaitu menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorikan mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda dan mana yang spesifik.

# BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. **Proses Implementasi Program Kartu *Kusuka* Bagi Nelayan di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur**

   a. Pengawasan Yang Melekat

   Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait implementasi program kartu kusuka di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur, sistem pengawasan melekat untuk program tersebut kurang optimal. Pengawasan yang dilakukan hanya dalam bentuk administrasi seperti penginputan, validasi, percetakan, dan pendistribusian, sementara bentuk pengawasan terhadap kinerja PPL di lapangan belum dilakukan. Dampaknya tidak ada evaluasi kinerja PPL jika mengalami hambatan-hambatan di lapangan, sehingga pelaksanaan program kartu kusuka tidak dapat terpantau dengan baik dan dievaluasi secara berkala.

   b. Keterpaduan Hierarki Antara Lembaga-lembaga Pelaksana

   Dalam implementasi program kartu *kusuka* bagi nelayan di Desa Margasari, terdapat keterpaduan hierarki antara lembaga-lembaga pelaksana, saat ini masih belum optimal terkait koordinasi antara PPL dan DKP untuk penginputan data serta pendistribusian kartu *kusuka* yang belum dilakukan oleh Bank BNI. Akan tetapi koordinasi PPL kepada masyarakat berjalan

dengan baik, sehingga beberapa masyarakat dapat memahami informasi yang diberikan terkait program kartu *kusuka*. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat, masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengetahui terkait program kartu *kusuka*, hal ini dikarenakan belum meratanya informasi yang sampai ke masyarakat terkait sosialisasi program kartu *kusuka* dilaksanakan. Salah satu kendala dalam pelaksanaan program ini adalah lokasi kantor cabang Bank BNI yang jauh dari Desa Margasari.

c. Sikap dan Sumber Daya Yang Dimiliki Kelompok

Sikap dan sumber daya yang dimiliki sebagai kelompok sasaran sangatlah penting dalam suatu implementasi program. Tanpa adanya penerimaan masyarakat dalam program yang ditawarkan, maka program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Program kartu *kusuka* di Desa Margasari telah berjalan selama periode 2017-2022, selama 5 tahun berjalan sikap masyarakat terhadap program ini sangatlah antusias. Tetapi dari banyaknya masyarakat yang antusias untuk mendaftarkan program ini, masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui program kartu *kusuka* ini, hal tersebut dikarenakan tidak meratanya informasi tentang adanya program kartu *kusuka* ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh PPL masih belum menyeluruh, disebabkan oleh kurangnya jumlah SDM implementor yang ditugaskan di lapangan.

Berdasarkan pernyataan diatas, proses implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sistem pengawasan khusus terhadap PPL di lapangan serta minimnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kartu *Kusuka* Bagi Nelayan di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur

Pada penelitian ini peneliti mendapati beberapa faktor pendukung dalam proses pelaksanaan implementasi program kartu *kusuka* bagi nelayan di desa Margasari Kabupaten Lampung Timur, terdapat dua faktor pendukung yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Masyarakat Terhadap Program

   Penerimaan dari masyarakat sebagai target sasaran merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam sebuah implementasi program kartu *kusuka*, hal tersebut dibuktikan bahwa tidak adanya bentuk penolakan dari masyarakat terhadap program kartu *kusuka*

b. LSM

   Terlibatnya LSM Mitra Bentala dalam implementasi program kartu *kusuka* sangat membantu PPL dalam mengumpulkan data dari masyarakat secara kolektif yang ingin mendaftar pembuatan kartu *kusuka* seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Terdapat dua penghambat dalam proses implementasi program kartu *kusuka* bagi nelayan di Desa Margasari Kabupaten Lampung Timur sehingga saat ini proses program tersebut belum berjalan optimal, tiga kendala tersebut sebagai berikut:

a. Penginputan Data

   Pada proses penginputan program kartu *kusuka* ini masih sering mengalami kendala, baik dalam teknis atau jaringan. Hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya kegagalan pada proses penginputan data. Di samping itu, *website* yang digunakan untuk penginputan data hanya dikelola oleh satu orang, sehingga penginputan data pada program kartu *kusuka* ini masih belum berjalan secara optimal.

b. NIK masyarakat tidak terdaftar

Proses pendaftaran kartu *kusuka* yang dilakukan oleh PPL terdapat beberapa masyarakat yang NIK nya tidak terdaftar di DISDUKCAPIL, sehingga pendaftaran tidak bisa dilanjutkan. Hal tersebut menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang belum memiliki kartu *kusuka*.

c. Sosialisasi yang belum merata

Sosialisasi yang dilakukan belum merata dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program kartu *kusuka*.

## 5.2 Saran

a. Kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebagai instansi pelaksana untuk dapat mengevaluasi implementasi program kartu *kusuka* di Desa Margasari terkait jumlah PPL di lapangan, karena jumlah PPL di lapangan sangat berpengaruh bagaimana program ini disosialisasikan ke masyarakat. Karena jika jumlah SDM implementor di lapangan terlalu sedikit hal itu akan mempengaruhi keberhasilan suatu program.

b. Kemudian pada instansi pelaksana diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih lanjut setiap tahunnya, supaya terdapat target yang harus dicapai dari program kartu *kusuka* ini dan dapat dipantau perkembangan jalannya program kartu *kusuka* di lapangan.

c. Kemudian diharapkan kepada KKP untuk membuat sistem pengawasan berkala serta monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai implementasi program kartu *kusuka*. Dan juga menambah SDM yang mampu melaksanakan tugas secara bertanggung jawab sehingga pengimplementasian program kartu *kusuka* ini bisa berjalan lebih optimal. Diharapkan juga KKP untuk membuat petugas khusus yg melakukan survei

berkala kepada masyarakat, dan membantu masyarakat yang tidak bisa atau kurang paham tentang program kartu *kusuka* ini.

d. Kepada PPL diharapkan untuk melakukan sosialisasi besar secara bergilir berdasarkan RT, sehingga informasi mengenai program kartu *kusuka* dapat diterima secara merata.

e. Kepada PPL dan DKP diharapkan untuk berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL untuk membahas terkait masyarakat-masyarakat yang NIK nya tidak terdaftar.

# DAFTAR PUSTAKA


Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In *Alfa Beta*.

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. https://Doi.Org/10.26858/Jiap.V1i1.132

Arnawa, I. M. (2020). Analisis Kebijakan Publik Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*. Https://Doi.Org/10.47532/Jic.V1i1.110

Besar, G. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana Haedar Akib. In *Haedar Akib/ Jurnal Administrasi Publik*.

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*.

Daniarsyah, D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Kusuka Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan. *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*. https://Doi.Org/10.31506/Jipags.V3i2.7552

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*. https://Doi.Org/10.29210/3003906000

Dewi, R. K. (2016). Studi Analisis Kebijakan. *Pustaka Cipta Bandung*.

Dinas Perikanan Kabupaten Sorong. (N.D.). *Kartu Pelaku Usaha Perikanan Dan Kelautan ( Kusuka) | Dinas Perikanan Kabupaten Sorong*. Retrieved June 6,

2022, From Http://Diskansorongkab.Id/Post/View/37--Kartu-Pelaku-Usaha-Perikanan-Dan-Kelautan-Kusuka

Eriyanti, F., & Yanto, S. (2019). Efektifitas Pemanfaatan Kartu Nelayan Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Ranah Research*.

Himawan, B., Arief, A. A., Fachry, M. E., & Amri, A. (2021). Analisis Efektifitas Pemanfaatan Kartu Kusuka Dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan ( Studi Kasus Kampung Nelayan Untia Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar ). *Journal Ponggawa*, *1*(1), 1–14.

Ichtiar, M. A., Marefanda, N., & Mardhiah, N. (2021). Implementation Of Marine And Fisheries Business Actor Card Policy (Kusuka) In West Aceh Region. *Jurnal Public Policy*.https://Doi.Org/10.35308/Jpp.V7i1.3354

Ken. (2020, March 5). *Kenapa Harus Punya Kartu Kusuka - Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pamekasan*. https://Perikanan.Pamekasankab.Go.Id/Kenapa-Harus-Punya-Kartu-Kusuka.Html

Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. Https://Doi.Org/10.30829/Ajei.V6i2.7713

Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*.

Moleong, L. J. (2019). Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya. *Pt. Remaja Rosda Karya*.

Pioh, A., Waworundeng, W., Pangemanan, F., & Kebijakan, E. (2020). *Issn : 2337 - 5736*. *2*(5).

Rachmawati, T. (2015). Kepatuhan Kelompok Sasaran Sebagai Penentu Keberhasilan

Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. https://Doi.Org/10.21776/Ub.Jiap.2015.001.02.5

Rahman, A. (2011). *Memahami Pendidikan Dan Ilmu Pendidikan.Pdf*. Laksbang Mediatama.

Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik.*

Ronasifah, F., Ati, N. U., & Hayat. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan ( Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ). *Jurnal Respon Publik.*

Satu Data Kkp. (N.D.). *Dashboard Kusuka* . Retrieved March 3, 2022, From https://Satudata.Kkp.Go.Id/Dashboard_Kusuka

Sugiyono. (2014). Teknik Pengumpulan Data Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.

Suharno. (N.D.). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik_2013_Suharno.Pdf* (P. 2013).

Surjana, O. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar. *Jurnal Rekayasa Hijau*. https://Doi.Org/10.26760/Jrh.V1i1.1337

Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Pertama). Graha Ilmu.